

KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENJELANG PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA

Ratu Khoirunnisa Marjuki

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: echamarjuki@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi tak lepas dari keberadaan partai politik. Partai politik (parpol) merupakan tempat atau wadah penyeleksian para calon pemimpin melalui serangkaian aturan. Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai islam terbesar di Indonesia yang masih mempertahankan eksistensinya di kancah perpolitikan Indonesia khususnya, di Yogyakarta. Dari tiga pemilu terakhir PKS selalu memperoleh suara yang fluktuatif di DIY. Adapun salah satu indikator yang mempengaruhi jumlah perolehan suara di pemilu baik di tingkat legislatif maupun eksekutif ialah komunikasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera menjelang pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi saat peneliti secara langsung melakukan penelitian. Untuk mengumpulkan data dalam menjawab permasalahan peneliti menggunakan kuesioner, dokumentasi, wawancara dan observasi. Komunikasi politik yang menjadi indikator komunikasi politik, pesan politik, sasaran/target, media dan efek komunikasi politik. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera memberikan isu baik isu positif dan negatif kepada masyarakat.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Partai Keadilan Sejahtera, Pemilihan Umum Presiden

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera menjelang pemilihan presiden tahun 2019 di kota Yogyakarta. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih pada masyarakat tentang bagaimana komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera khususnya menjelang pemilihan presiden tahun 2019 di kota Yogyakarta. Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu wujud demokrasi di Indonesia adalah adanya kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Keberadaan partai politik (parpol) sangatlah penting karena partai politik tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Partai politik berperan sebagai tempat atau wadah penyeleksian para calon pemimpin dengan caranya mereka masing-masing dengan tetap mengikuti peraturan yang telah di

atur dalam undang undang itu sendiri. Di suatu negara yang ber asaskan demokrasi, suatu kesempatan pemilu (pemilihan umum) di anggap sebagai tanda atau lambang, sekaligus menjadi parameter dari apa yang dinamakan sebagai demokrasi itu sendiri, hasil pemilu di selenggarakan dalam susana keterbukaan dengan kebebasann berserikat dianggap mencerminkan partisipasi dari masyarakat.

Menurut Aurel Croissant sebagaimana dikutip oleh Prihatmoko (2008: 4-5) mengemukakan tiga fungsi pokok Pemilu, yaitu, fungsi keterwakilan, fungsi integrasi, fungsi mayoritas. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa Pemilu merupakan suatu kegiatan atau event politik yang berfungsi untuk memilih perwakilan masyarakat yang akan melaksanakan berbagai hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas Masing-masing partai politik sebagai peserta Pemilu memiliki cara- cara tersendiri untuk memperoleh dukungan dan suara (vote) dari masyarakat, salah satunya yaitu strategi komunikasi politik.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa momentum tahun yang akan datang yakni tahun 2019 merupakan momentum pesta rakyat dalam menentukan suatu pemilihan baik di tingkat Legislatif maupun Eksekutif. Begitu banyak cara atau upaya yang di lakukan suatu partai politik di dalam negeri ini yakni Indonesia mereka (parpol) sangatlah giat dalam hal meraih suara dalam pemilihan umum baik di tingkat Kabupaten/kota hingga DPR RI, dalam hal ini Legislatif, maupun Eksekutif yang menduduki kursi RI sebagai Presiden.

Wacana politik Islam di dalam negeri ini (Indonesia) selalu menjadi bahan yang sangatlah menarik perhatian publik atau suatu kalangan. Alasan yang di kemukakan sangatlah sederhana. Agama Islam adalah agama yang dianut atau dipeluk oleh kebanyakan penduduk Indonesia. Islam pun merupakan ajaran yang dapat meberikan poin poin penting dalam suatu permasalahan politik atau biasa disebut siyasah. Dengan sebab itu sangatlah kuat kaitannya antara Islam dan politik dengan dapat memperlihatkan catatan penting khususnya dalam sejarah perpolitikan Indonesia.

Meskipun pada kenyataannya Kota Yogyakarta menjadi basis bagi mayoritas anggota salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bukan berarti PKS tak memiliki tempat di DIY. Jika di lihat dari tiga Pemilu terakhir, PKS selalu memperoleh suara yang relatif stabil. Namun partai yang dulunya bernama partai keadilan (PK) ini masih memiliki beberapa kendala seperti masih lemahnya relasi politik dengan publik, ruang lingkup komunikasi politik resiprokal yang sempit,

minimnya pendekatan publisitas, pendekatan persuasi yang tidak merata, kegagalan dalam membangun manajemen reputasi politik, minimnya hubungan politik dengan publik, dan minimnya *political community building* (pembangunan komunitas politik). Sehingga kedepannya di dalam pemilu mendatang, PKS bisa meningkatkan presentase jumlah suara (Aufa, 2004)

Yang tidak kalah pentingnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu contoh yang terlibat dalam hingar bingar ramainya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Indonesia. Bahkan jauh sebelum pemilihan presiden tahun 2019 mereka sudah mempersiapkan kader baik untuk menjadi presiden atau pendamping (wakil presiden). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan perubahan dari Partai Keadilan (1999) adalah salah satu partai politik (parpol) yang memiliki ideologi Islam. PKS dapat dibilang sebagai partai baru karena resmi pada tahun 2003 yang merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) dan PKS. Sejak pemilu 2004 PKS menunjukkan taringnya sebagai salah satu parpol yang cukup kuat dan diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Di tahun 2004, PKS berhasil memperoleh sekitar 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% total perolehan suara. Pada pemilu selanjutnya di tahun 2009 PKS memperoleh suara yang cukup stabil yakni sebesar 8.206.955 suara atau 7,88% dan menempati peringkat keempat. Sementara pada tahun 2014 PKS berhasil meningkatkan jumlah pemilih walau tidak signifikan dengan jumlah suara 8.480.204 atau sebesar 6,79% dan menempati peringkat ketujuh dari lima belas partai yang berkompetisi merebutkan kursi legislatif. (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2014)

Berbeda dengan PKS, partai-partai besar seperti suara Partai Demokrat memiliki kenaikan jumlah suara secara tajam. Sedangkan partai-partai besar lainnya seperti Partai Golkar, PDIP, PKB, dan PPP, cenderung mengalami penurunan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mampu mempertahankan perolehan suaranya seperti pada pemilu pada tahun 2004. Kenyataan ini telah menimbulkan pertanyaan yang memerlukan jawaban, kiranya strategi apa yang di pakai oleh PKS menjelang pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

Naiknya pamor PKS yang diperoleh pada tahun 2004 dan stabilnya perolehan suara PKS merupakan hasil dari strategi dan juga program yang sudah dibuat. Strategi komunikasi politik dari PKS inilah yang menyebabkan PKS tetap bertahan dalam kancah perpolitikan terutama dalam ajang pemilu. PKS sebagai partai politik memiliki keunikan tersendiri, PKS berbeda dengan parpol

lainnya yang mengutamakan figur pimpinan mereka namun lebih membawa jargonnya “Bersih, Peduli, dan Profesional”. PKS berusaha menonjolkan jargon partai yang dianggap dapat lebih menyentuh kepada masyarakat serta totalitas dan juga loyalitas dari kader-kader PKS yang tetap setia dan membawakan sikap nyata di tengah-tengah masyarakat.

Walaupun PKS sempat tertimpa kabar yang merugikan partainya yakni terkait isu korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden partai Lutfi Hasan Ishaq, tetapi PKS tetap bertahan dengan jumlah pemilih yang tidak sedikit yaitu sekitar 8 juta empat ratus pemilih. Basis pemilih yang loyal lah yang menjadi kekuatan PKS dapat eksis dalam ranah perpolitikan Tanah Air.

Tidak ada yang bisa terlepas dari dunia komunikasi termasuk salah satunya yakni politik. Karena suatu kegiatan politik pasti saja didasari oleh suatu komunikasi seperti bagaimana menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Negara. Komunikasi politik adalah bagian dari 7 sistem politik yang tidak dapat berjalan sendiri, karena komunikasi ini lah yang dapat saling membantu berjalannya suatu sistem-sitem politik lainnya.

Selain itu guna memenangkan kompetisi di ajang pemilu, para kontestan partai politik saling bersaing satu sama lain dengan menerapkan berbagai strategi komunikasi politik yang jitu. Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu.. Strategi komunikasi politik sangat penting untuk dianalisis. Karena strategi tersebut tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Strategi memberikan beberapa manfaat melalui kegiatan taktiknya yang mampu membangun dan menciptakan kekuatan melalui kontinuitas serta konsistensi. Selain itu, arah strategi yang jelas dan disepakati bersama akan menyebabkan perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat.

Bisa kita gambarkan seperti pemilu (Pemilihan Umum) presiden yang sudah barang tentu merupakan kegiatan komunikasi politik di Indonesia. Mengapa? Karena salah satu definisi politik adalah salah satu bagian dari seni yang memperebutkan sesuatu dalam hal jabatan seperti presiden contohnya. Terdapat bebrapa strategi dalam memperebutkan suatu kekuasaan “bangku presiden” salah satunya yakni adanya pencitraan calon presiden yang mengikuti pemilihan umum. Pencitraan

politik yang seperti ini sebetulnya sudah merebak mulai dari awal pemilu tahun 1999 yang semakin lama semakin berkembang hingga saat ini yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan secara sistematis melakukan pengumpulan data, pengorganisasian data dan menginterpretasikan informasi tekstual termasuk video dan gambar, serta menggunakan pendekatan induktif dalam mengungkap fenomena yang sulit untuk dikuantifikasi. Penulis juga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta-fakta dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Untuk lokasi penelitian terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di pusat kantor Partai Keadilan Sejahtera yang berada di pusat kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu 1) Data primer merupakan data yang wajib dibutuhkan karena diperoleh dari pihak pertama melalui tahapan wawancara dan kuisioner oleh peneliti di lokasi penelitian baik lingkungan pengurus partai PKS, Non-PKS, dan masyarakat, 2) Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung dan dapat dihasilkan oleh media, dokumen, atau informasi lainnya yang mendukung pengembangan penelitian. Serta teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu proses yang dilaksanakan dalam penelitian kualitatif yang dimulai dari reduksi data, data *display* dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKS di Yogyakarta

Kantor pusat Partai Keadilan Sejahtera yang berada di Yogyakarta berada di Jalan Gambiran No. 43, Yogyakarta dengan keadaan partai politiknya yang terus berkembang baik di dalam kota yang mayoritas muslim ini, dengan berlandaskan partai dakwah. Menurut Sohibul Iman, diusianya yang sudah memasuki 20 tahun, PKS terus menunjukkan eksistensinya dan tumbuh menjadi partai besar dan diperhitungkan. Namun demikian, perkembangan tersebut juga mendatangkan tantangan/rintangan yang besar pula berupa fitnah dan konspirasi. "Hal itu wajar

karena ada pihak-pihak yang terganggu dengan eksistensi PKS yang semakin diperhitungkan di kancah perpolitikan tanah air," terang Sohibul Iman saat acara. (Widiyanto, 2018)

Dilihat dari kumpulan aktor, PKS menunjukkan dirinya adalah partai politik yang mempunyai SDM yang terdidik dengan sangat baik, dilihat dari basis pendidikan atau intelektual, aktor-aktor politik PKS di level kota Yogyakarta merupakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hampir semuanya merupakan sarjana strata. Citra diri sebagai partai yang mengedepankan profesionalisme.

Dilihat dalam konteks kaderisasi partai, aktivisme beroorganisasi yang di tunjukkan aktor politik PKS menjadi modal berharga bagi PKS. Kuatnya latar belakang organisasi yang di miliki aktor tentu memudahkan PKS sebagai institusi dalam bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Ini karena para aktor telah mempunyai tradisi berorganisasi sejak masih muda sehingga tidak lagi canggung ataupun gagap ketika berkomunikasi dengan masyarakat.

Secara struktural, proses penyerapan aspirasi masyarakat yang di lakukan PKS ada di berbagai tingkatan mulai kabupatenn di bawah kendali struktur pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) lalu untuk kecamatan di bawah koordimasi dewan pimpinan kecamatan (DPC) dan untuk tingkat desa atau kelurahan di bawah koordinasi dewan pimpinan ranting (DPRa).

1. Strategi Komunikasi Politik

1.1 Komunikator Politik

Untuk melakukan komunikasi politik yang baik maka di perlukan seorang komunikator yang handal agar memperlancar jalannya komunikasi politik. Komunikasi politik sangat penting dalam suatu partai politik untuk menselaraskan visi dan misi partai tersebut, bisa untuk mencapai suatu tujuan tersebut, dan untuk meredakan konflik di antara anggota anggota partai.

“.....kami sebagai pihak partai untuk mendapatkan komunikator politik yang handal melakukan strategi baik itu dari kaderisasi maupun pendidikannya, karena dengan kita memperoleh komunikator yang handal maka seluruh komunikasi politik akan berjalan lancar....”(Bpk. Rosyidi,16 November 2018)

Dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera untuk meningkatkan komunikasi politik yang baik dengan memperoleh komunikator yang handal melakukan berbagai macam strateg, diantara lain adalah sebagai berikut:

1. Dari konteks kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, aktivisme berorganisasi dilihat dari latar belakang organisasi yang di miliki aktor. Karena ketika aktor politik memiliki tingkat organisasi yang cukup maka dapat menjamin kemampuan komunikasi politik aktor tersebut. *“... Untuk kaderisasi kami membebaskan seluruh masyarakat untuk bergabung akan tetapi, tetap dengan persyaratan yang telah kami tentukan tentunya yang paling utama adalah beragama islam...”* (Bpk. Rosyidi, 16 November 2018)

2. Dari konteks pendidikan, pendidikan merupakan hal penting yang harus di miliki oleh setiap aktor politik. Kualitas pendidikan sangatlah menjamin kemampuan dari aktor partai dalam menyelenggarakan komunikasi politik.

“... PKS merupakan partai politik yang mempunyai SDM yang terdidik dengan sangat baik, dilihat dari basis pendidikan atau intelektual, aktor-aktor politik PKS di level kota Yogyakarta merupakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hampir semuanya merupakan sarjana strata. Dengan citra diri sebagai partai yang mengedepankan profesionalisme...” (Bpk. Rosyidi, 16 November 2018)

1.2 Pesan Politik

Pesan politik disini terdapat suatu pernyataan baik secara tertulis maupun tidak tertulis baik yang sembunyi –sembunyi ataupun secara terang terangan, baik secara verbal maupun non verbal, secara tidak langsung hal tersebut mengandung bobot politik di dalamnya. Contohnya seperti Pidato Politik, spanduk atau baleho serta iklan politik lainnya.

“..... Membangun kebersamaan terhadap seluruh elemen masyarakat, baik yang berbeda latar belakang, suku, ras dan agama, untuk membangun bangsa. Secara konteks nasional, melahirkan kepedulian dan kebersamaan adalah visi misi yang sama bagi seluruh masyarakat sebagai perwujudan cita-cita nasional...”. (Bpk. Rosyidi, 16 November 2018)

Gambar 3.1 Kegiatan Pidato PKS



Sumber : Partai Keadilan Sejahtera, 2018

1.3 Media/ saluran

Proses komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam menjelang pemilihan umum presiden tahun 2019 ini membutuhkan media perantara. Media perantara berfungsi untuk mempermudah komunikator dalam menyampaikan sebuah pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat umum. Media tersebut bisa melalui media cetak, media elektronik, format kecil dan media luar ruangan.

1. Media Cetak

Dalam melakukan komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pesan komunikator salah satunya melalui media cetak. Media cetak

“.... Kami dari pihak partai selalu memanfaatkan media cetak sebagai alat dalam komunikasi politik, seperti benner/spanduk, koran guna, mengkapanyekan salah satu dari kader yang di usung dari partai PKS sendiri...” (Bpk. Rosyidi, 16 November 2018)

Gambar 3.2 Pamflet PKS



Sumber : Partai Keadilan Sejahtera, 2018

2. Media Elektronik

Partai Keadilan Sejahtera melakukan koalisi dengan partai Gerindra. Selain, melalui media cetak dalam melakukan komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera juga menggunakan media elektronik.

3. Media format kecil

Melalui media format kecil Partai Keadilan Sejahtera memberikan leaflet, brosur, selebaran. Dengan memberikan selebaran brosur, leaflet diharapkan mampu menyampaikan pesan komunikasi dari komunikator.

“... Untuk memberikan selebaran brosur ataupun kartu nama memeang benar kami berikan kepada khalayak ramai, guna masyarakat lebih mengenal siapa kandidat yang akan mereka pilih tersebut...” (Bpk. Rosyidi, 16 November 2018)

Gambar 3.3 Calon Kandidat dari PKS



Sumber : Partai Keadilan Sejahtera, 2018

4. Media luar ruangan

Masyarakat daerah Kota Yogyakarta memiliki latar belakang yang beragam, untuk menyikapi keberagaman tersebut Partai Keadilan Sejahtera melakukan komunikasi politik dengan memberikan hadiah/cenderamata yang berciri khas Partai Keadilan Sejahtera seperti topi, baju, pulpen dan lain-lain.

“..... Untuk memberikan hadiah/cendramata yang ber cirikhaskan PKS itu tergantung dari acara-acara tertentu yang di adakan oleh kader tersebut...” (Bpk. Rosyidi, 16 November 2018)

Gambar 3.4 Baju PKS



Sumber : Partai Keadilan Sejahtera, 2018

1.4 Sasaran atau target politik

Sasaran atau target politik Partai Keadilan Sejahtera dalam menjelang pemilihan umum presiden tahun 2019 di Kota Yogyakarta adalah semua masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera menargetkan semua masyarakat dalam melakukan komunikasi politik berbagai kalangan, seperti pelajar/mahasiswa, ibu-ibu, dan lain-lain.

Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendekatan secara langsung dengan mendatangi masyarakat. Dalam melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat partai Keadilan Sejahtera melalui cara seperti memberikan pelayanan kesehatan gratis, sosialisasi bencana dan lain-lain. Hal ini diharapkan mampu menarik target/sasaran komunikasi politik Partai Politik Sejahtera yang akan memberikan pengaruh terhadap jumlah suara dalam menjelang pemilihan umum presiden tahun 2019 di Kota Yogyakarta.

Gambar 3.5 Kegiatan Partai Keadilan Sejahtera saat Pelayanan Kesehatan



Sumber : Partai Keadilan Sejahtera

1.5 Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai – partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum. Partai Keadilan Sejahtera melakukan komunikasi politik melalui berbagai bentuk akan memberikan pengaruh terhadap pengumpulan jumlah suara.

Ketika komunikasi politik mampu berjalan lancar telah dianggap memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menentukan penentuan hak suaranya. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi presiden di pemilihan umum presiden tahun 2019 di Kota Yogyakarta.

Dari komunikasi politik dalam menjelang pemilihan umum presiden tahun 2019 di Kota Yogyakarta, memberikan isu negatif dan isu positif di kalangan masyarakat. Dalam menyikapi isu-isu tersebut untuk mengetahui respon dari masyarakat yang menjadi sasaran/target dari komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera peneliti melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 70 responden. Adapun hasil pendapat dari responden yang diambil dalam penelitian ini terhadap komunikasi politik yang memberikan isu sebagai berikut:

Pendapat Responden Tentang Kepuasan Masyarakat pada Isu Positif PKS di DI Yogyakarta tahun 2019 menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih biasa saja. Yaitu 45,71% padahal yang di maksud adalah bagaimana PKS menyampaikan isu positif adanya responden yang

mengatakan kurang memuaskan (14,28%) bahkan tidak memuaskan sama sekali (7,14%) adalah karena melihat demo besar besaran yang di lakukan oleh para artis Neno Warisman dan Ahmad Dhani bersama pimpinan PKS madani Ali Sera tentang ganti presiden 2019. Walaupun kita tahu bahwa 2019 adalah pemilihan presiden jadi jika ganti presiden berarti mengharapkan kekalahan petahana (incumbent) penampilan televisi saat ini berpengaruh terhadap masyarakat yang menjadi responden penulis di kota Yogyakarta ini.

Sedangkan wawancara penulis dengan responden mereka menyampaikan bahwa Partai Kesejahteraan Sosial terus mengajak pihak-pihak yang dapat bekerja sama dalam membantu mengatasi suatau problematika yang terjadi di tengah masyarakat. Dan dari pihak PKS pun mengharapkan respon yang sangat baik atau positif mengenai saling gotong royong atau saling membantu sesama manusia dalam mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat tersebut.

Pendapat Responden tentang Kepuasan Masyarakat pada Isu Negatif PKS di DI Yogyakarta tahun 2019 menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih biasa saja. Sedangkan yang mengatakan bahwa isu negatif yang di lemparkan PKS cukup memuaskan berjumlah 14,28% adalah melemparkan isu yang bertujuan negatif seperti kelemahan Jokowi menyebutkan Ibu Al-Quran dengan Al Patekah (maksudnya adalah Al Fatihah) tanpa menjelaskan bahwa hal tersebut adalah logat jawa. Karena yang memulai adalah ulama PKS hal tersebut berpengaruh kepada responden penulis.

Sedangkan wawancara penulis dengan responden mereka menyampaikan bahwa PKS merupakan salah satu partai islam yang bercorakan dakwah yang sangat meminimalisir terjadinya isu negatif hingga terdengar ke telinga masyarakat. walaupun ada saja isu negatif yang terdengar, seperti isu isu yang menyebutkan bahwa parpol tersebut radikal dan intoleran. Akan tetapi pks tetap memastikan untuk tidak mudah di pengaruhi oleh isu isu yang beredar, dengan begitu PKS masih saja terus menyebarkan isu isu positif yang di berikan atau di suguhkan kepada masyarakat.

Pendapat Responden tentang Kepuasan Masyarakat pada PKS dalam melayani masyarakat DI Yogyakarta tahun 2019 menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih biasa saja. 18,57% responden mengatakan bahwa pelayanan PKS sangat memuaskan di tambah lagi dengan 27,14% pelayanan PKS memuaskan artinya adalah hampir separuh responden berpikiran positif terhadap PKS. Responden berpendapat bahwa setiap ada bencana alam seperti Gempa, Tsunami, Banjir,

dll. Tampak yang membantu membawa bendera PKS bahkan di dampingi dengan membawa bendera Palestina sehingga terbentuk opini bahwa mulai dari luar negeri hingga dalam negeri PKS yang melakukan pelayanan terhadap berbagai orang terlantar, ini berpengaruh terhadap responden penulis di DI Yogyakarta karena mereka menonton Televisi.

Sedangkan wawancara penulis dengan responden mereka menyampaikan bahwa PKS cukup baik dalam melayani masyarakat seperti memberikan pelayanan kesehatan gratis, Lomba mewarnai bagi kalangan anak di bawah umur, Konsultasi Keuangan Keluarga, maupun pemberian bantuan kepada masrakat yang sedang terkena bencana baik bantuan secra dana maupun jasa.

Pendapat Responden tentang Kepuasan Masyarakat pada PKS dalam mengkritik pemerintah menghadapi pilpres di DI Yogyakarta tahun 2019 menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih sangat memuaskan. Responden penulis yang mengatakan kritik terhadap pemerintah tersebut. Berjumlah 25,71%, bahkan yang mengatakan sangat memuaskan berjumlah 31,42% artinya adalah 56% lebih PKS mantap dalam mengkritik pemerintah. Kritik tersebut diantaranya tentang jalan tol yang di buat pemerintah hanya untuk orang kaya, reklamasi peninggalan ahok hanya untuk orang kaya. Penangkapan ulama (Habib Rasyid Siddiq) adalah kebencian pemerintah terhadap islam sehingga lahirlah tuduhan pemerintah Jokowi sebagai rezim.

Sedangkan wawancara penulis dengan responden mereka menyampaikan bahwa memang masyarakat tidak terlalu mengetahui bagaimana dampak dari kritikan yang di berikan partai tersebut kepada beberapa kebijakan pemerintah seperti Pemerintahan Jokowi-JK pada awal awal memerintah sebagai atasan Negara memberikan sebuah harapan harapan yang sangat tinggi kepada masyarakat Indonesia dengan sangat optimis bahwa ekonomi akan meroket di tahun berikutnya. Akan tetapi dalam evaluasi Fraksi PKS janji tersebut dinilai masih belum terlihat nyata.

Pemerintah masih saja mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat yang kemudian berdampak terhadap perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. "Satu yang paling nyata adalah kenaikan harga-harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti BBM, listrik, dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, dan biaya-biaya lain termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan,". Dengan seperti itu mengakibatkan biaya hidup yang semakin tinggi yang akan di tanggung oleh masyarakat, terutama bagi penduduk dengan penghasilan rendah seperti 40% terbawah. Dan sementara itu masyarakat

atau penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanjanya, yang tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan.

Pendapat Responden tentang Kepuasan Masyarakat pada Nasionalis PKS di DI Yogyakarta Tahun 2019 menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih memuaskan. Tetapi masih ada di temukan 14,28% nasionalisme PKS kurang memuaskan bahkan 4,28% nasionalisme PKS tidak memuaskan sama sekali. Hal ini bisa terlihat dari sekolah sekolah yang berada di naungan PKS tidak di temukan tiang bendera merah putih bahkan para siswa asing untuk menyebut pancasila. Terlebih lagi adsa kata kata tuduhan terhadap pemerintah sekarang ini dengan thogut. Kendati Ustad yang menyampaikan memang memperlihatkan kening yang hitam dan celana panjang yang menggantung sebagai ciri Nabi Muhammad SAW yang sudah barang tentu adalah ulama PKS.

Sedangkan wawancara penulis dengan responden mereka menyampaikan bahwa beragam permasalahan yang menggelayuti negri ini dari mulai korupsi, kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, lemahnya daya saing, hingga degradasi moral hal ini seakan terus mengikis rasa bangga kita pada Indonesia. Memudarnya identitas moral pun memang sangat berproses dengan ditunjukkan oleh fakta bahwa kini life style ala barat yang sangat matrealistik menjadi sesuatu yang diminati atau di gandrungi oleh muda mudi kita.

Lalu bagaimana PKS dengan nasionalisme mengenai hal tersebut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menegaskan, sejak dulu PKS adalah partai nasionalis meskipun menggunakan Islam sebagai azas partai. nasionalisme adalah bagian dari Islam sehingga kalau PKS menggunakan asas Islam sebagai identitas partai, bukan berarti tidak nasionalis. PKS tidak pernah mendikotomikan antara Islam dan Nasionalis. Karena orang Islam sudah barang tentu mencintai Tanah Airnya karna itu adalah bagian dari ajaran Islam.

Pendapat Responden tentang Kepuasan Masyarakat pada Islamisasi PKS di DI Yogyakarta menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih sangat memuaskan. Memang untuk hal ini 35,71% responden mengatakan sangat memuaskan islamisasi PKS di tambah lagi 24,28% responden mengatakan memuaskan hal ini terlihat dari setiap acara keislaman baik di bulan ramadhan atau di luar bulan ramadhan PKS memenuhi acara acara masjid dari siang sampai malam lengkap dengan i'tikaf yang mereka lakukan.

Sedangkan wawancara penulis dengan responden mereka menyampaikan PKS merupakan salah satu partai yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah. Pencitraan diri PKS sebagai partai dakwah merupakan perwujudan dari partai yang berlandaskan agama Islam. Oleh karena itu strategi yang di lakukan oleh PKS ini bercorak dakwah.

Dapat kita lihat dari segi proses, dakwah pada dasarnya merupakan transformasi sosial yang bergerak di antara keharusan ajaran yang terdapat di dalam agama Islam, sedangkan masyarakatlah yang di jadikan objek utamanya. Oleh karena itu, dakwah sebetulnya di lakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kultural. Dimensi politik, baik menyangkut pesan maupun lingkungan dimana dakwah dapat di jalankan, juga merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari kegiatan dakwah itu sendiri.

Pendapat Responden tentang Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan PKS di DI Yogyakarta Tahun 2019 menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih memuaskan. Responden yang memilih memuaskan berjumlah 32,85% bahkan yang memilih sangat memuaskan berjumlah 28,57% hal ini terlihat dari pemberian kepada fakir miskin, orang tua jompo, anak yatim piatu dan masyarakat lain yang di bawah garis kemiskinan di berikan sumbangan dalam bentuk beras tetapi di berikan dalam bungkus dan kotak yang berlabel PKS untuk itu penulis melihat 8,57% mengatakan kurang memuaskan dan 7,14% mengatakan tidak tidak memuaskan sama sekali karena responden yang di luar PKS mengatakan ketika tangan kanan meberi tangan kiri tidak perlu tahu.

Sedangkan wawancara penulis dengan responden mereka menyampaikan bahwa memang begitu adanya ketika PKS memberikan pelayanan seperti kesehatan ataupun berupa pemberian sembako kepada fakir miskin, masyarakat disini dalam penilaian tersebut menganggap cukup memuaskan dengan berbagai bantuan yang telah di ulurkan PKS kepada fakir miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Hingga masyarakat pun turut bahagia ataupun mendoakan PKS agar tetap melayani masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan pelayanan kesehatan atau pemberian sembako secara gratis.

Walaupun dari pihak PKS sendiri masih merasa kurang dalam menyebarkan kebaikan tersebut, atau yang kita sebut pelayanan gratis baik secara kesehatan ataupun bahan baku makanan, tetapi dari pihak partai terus berusaha dalam terus menyebarkan pelayanan kepada fakir miskin dengan cukup baik atau semaksimal mungkin.

Pendapat Responden tentang Kepuasan Masyarakat pada Antisipasi PKS dalam Kejahatan di DI Yogyakarta menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih Biasa Saja. Antisipasi PKS terhadap dekadensi moral di DIY ini cukup beragam 30% mengatakan sangat memuaskan, 24,28% mengatakan memuaskan, 38,57% mengatakan biasa saja, 4,85% mengatakan tidak memuaskan. Padahal responden mengatakan lebih banyak FPI (Forum Pembela Islam) yang melakukan nahi munkar dan tataran berikutnya di isi oleh kelompok kelompok “Hamka Darwis” (Cabang P3) dan kemudian menyusul HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang banyak mengantisipasi kejahatan. Itupun masih di temukan lokalisasi pelacuran sarkem dan lokasi perjudian di gamping.

Sedangkan wawancara penulis dengan responden mereka menyampaikan bahwa pks sudah cukup baik dalam hal mengantisipasi kejahatan dan dekadensi moral, hanya saja mungkin masyarakat belum begitu mengetahui sejauh mana PKS mengatasi suatu kejahatan seperti di dalam RUU PKS juga mengatur tentang peran serta masyarakat. Misalnya, terkait pengaduan dan layanan terpadu oleh masyarakat atau komunitas setempat. RUU PKS juga mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Sebagai contoh, pelaku dibebankan untuk membayar restitusi bagi korban dan lain sebagainya.

Pendapat Responden tentang Kepuasan Masyarakat pada PKS dalam Mempertahankan Presiden Jokowi, Ma'ruf untuk 2 periode menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih Tidak memuaskan sama sekali. Walaupun di temui 20% responden mengatakan biasa saja tentang keinginan PKS mempertahankan Presiden Jokowi untuk memerintah 2 periode. Tetapi di temukan 54,28% responden mengatakan tidak memuaskan sama sekali di tambah lagi 10% kurang memuaskan, karena ada responden yang mendengar dari kader PKS bahwa pada tahun 2019 nanti siapapun yang maju yang penting bukan Jokowi. Apapun yang di katakan orang terhadap pasangan Prabowo Sandi walaupun Jokowi sudah mengambil calon pendamping seorang Kiyai Haji dari golongan NU, tetap saja keluar kata kata Kiyai Munafik.

Sedangkan wawancara penulis dengan responden mereka menyampaikan bahwa tidaka adanya kepuasan masyarakat terhadap PKS itu sendiri mengenai mempertahankan presiden Jokowi karena bisa di lihat dari relasi antar partai Jokowi dengan PKS saja sudah berbeda apalagi mengenai kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya oleh presiden Jokowi tersebut, akan tetapi dari pihak PKS sendiri tetap baik dalam berkomunikasi kepada Jokowi yang saat ini masih menjadi kepala negara kita yakni Indonesia.

Pendapat Responden tentang Kepuasan Masyarakat pada PKS dalam Perubahan Ganti Presiden menunjukkan bahwa responden terbanyak memilih memuaskan. Responden yang mengatakan PKS memuaskan dalam tagar ganti presiden berjumlah 50% bahkan di berbagai stasiun televisi acara debat, yang menampilkan pimpinan PKS untuk ganti presiden dan pimpinan HTI untuk Ganti sistem telah menjadi (*image*) penonton di DIY oleh karena itu hanya di temukan 10% yang masih menginginkan petahanan.

KESIMPULAN

Sebagaimana partai sekuler pada umumnya maka strategi komunikasi PKS menjelang pilpres tahun 2019 di DIY mengikuti saran DPP PKS pusat yaitu mencari ketidak berhasilan petahana (*incumbent*) dengan melempar isu negatif di satu sisi, sedangkan di sisi lain berusaha menutupi pihak yang di dukung dengan melemparkan isu positif. Untuk itu PKS ingin mendapat kepastian mengenai kedudukan yang akan mereka peroleh dari partai oposisi yang mereka dukung.

Komunikasi yang sepatutnya di lakukan PKS menjelang pilpres tahun 2019 seharusnya tetap bertindak jujur apapun yang terjadi, tetapi sebagai partai politik ada usaha untuk bertahan dan berdiri di 2 kaki, sementara tetap memperjuangkan untuk menang legislatif baik di pusat ataupun daerah khususnya DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, A. (2011). Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Aufa, N. A. (2004). Strategi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilu 2014. 8.

Budiarjo, M. (2008). Dasar dasar Ilmu Politik. In Dasar dasar Ilmu Politik (pp. 405-410). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jokowi Masuk 500 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia. (2018, april 13). Retrieved from
Tribun news: [http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/13/jokowi-masuk-500-tokoh-
muslim-berpengaruh-di-dunia](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/13/jokowi-masuk-500-tokoh-muslim-berpengaruh-di-dunia)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2014). Retrieved from <https://kpu.go.id>

Nimmo, D. (2005). Komunikasi politik, Komunikator, pesa, dan media, trj. Tjun Sujarman.
Bandung: Remadja Rosda Karya.

Stiyadi, R. L. (2008). Kebijakan Publik. In R. L. Stiyadi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk
SMK dan MAK kelas X (p. 164). Jakarta: Erlangga.

Suadh, S. R. (2014). Rekrutment Politik. 4.

Wirawan. (2009). Konflik. 5.